**BAB 10**

**ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN**

1. **PENDAHULUAN**

# Bab kesepluluh akan membahas mengenai analisis perumusan kebijakan. Bab ini menjadi dasar untuk bab-bab berikutnya. Uraian bab ini berisi penjelasan tentang merumuskan masalah kebijakan, forecasting dan rekomendasi aksi-aksi kebijakan

**Kompetensi Dasar**

Mampu memahami Analisis Perumusan Kebijakan Publik yang meliputi : analisis keputusan, tahapan analisis kebijakan.

**Indikator**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menggunakan analisis keputusan dalam Perumusan Kebijakan
2. Menganalisis rumusan masalah kebijakan, ramalan (*forecasting*) masa depan kebijakan, penilaian alternative dan rekomendasi aksi-aksi kebijakan dalam perumusan kebijakan

**Tujuan Pembelajaran**

1. Menguasai analisis keputusan dalam Perumusan Kebijakan.
2. Menguasai tehnik-tehnik rumusan masalah kebijakan, ramalan (*forecasting*) masa depan kebijakan, penilaian alternative dan rekomendasi aksi-aksi kebijakan dalam perumusan kebijakan
3. **PENYAJIAN MATERI**
4. **Analisis Keputusan dalam Perumusan Kebijakan**

Perumusan kebijakan, sebagaimana disitir oleh Parson (1997:246), merupakan proses dimana aktor menentukan pembuatan kebijakan melalui sebuah proses interaksi fakta dan nilai-nilai aktor. Dengan demikian, sesungguhnya ada interaksi keyakinan, ide, kepentingan aktor pembuat kebijakan terhadap fakta/realitas yang ada. Dalam proses pembuatan kebijakan, aktor akan berinteraksi dengan aktor lain dalam konteks hubungan pengetahuan dan kekuasaan (otoritas) yang pada gilirannya menghasilkan tingkat rasionalitas pembuatan kebijakan yang kompatibel dengan dunia riil yang ada anekaragam fakta, nilai, cara dan tujuan. Pembuatan kebijakan (*policy making*) yang dilakukan aktor tidak terjadi diruang yang terisolasi. Pembuatan kebijakan terjadi dalam konteks ekonomi, sosial, geografi, historis dan kultural yang terbatas. Aktor pembuat kebijakan melakukan penilaian terhadap realitas, penilaian realitas bisa dikatakan membentuk batas-batas dari hal-hal yang mungkin dan diharapkan, atau hal-hal yang seharusnya *(ought to be*) dalam kebijakan.

Kemudian, dalam konteks pembuatan kebijakan biasanya digunakan berbagai macam disiplin akademik dan kerangka pemikiran. Fokus dari masing-masing disiplin dan kerangka tersebut juga bervariasi. Untuk sesuatu yang kompleks, seperti pembuatan keputusan oleh individu dan kelompok, satu kerangka atau disiplin saja tidak mungkin dapat menjelaskan segalanya, karena ada hal-hal yang dititikberatkan dan ada hal lain yang diabaikan. Karenanya dalam memahami fokus penelitian yang dipilih, maka penulis merekomendasikan beberapa pendekatan yang dipergunakan untuk memahami substansi perumusan kebijakan, diantaranya :

**Analisis Jaringan dalam Perumusan Kebijakan**

Pendekatan ini dalam analisis, mengkaji aspek relasional dan informasional dalam pembuatan kebijakan. Dalam kasus pembuatan kebijakan, istilah ini menarik, karena konsep ini memberi perhatian pada bagaimana kebijakan muncul dari kesalinghubungan (*interplay*) antara orang dan organisasi dan memberikan gambaran yang lebih informal tentang bagaimana kebijakan riil dilaksanakan. Tulloch dalam Parson (1997:184-185) mengatakan bahwa jaringan digunakan untuk dua hal. *Pertama*, sebagai kata kerja (*verb*), menyusun jaringan (*to network*) berarti menjalin kontak untuk mendapat keuntungan. *Kedua*, berasal dari bahasa teknologi komputer, yakni komputer yang saling terhubung. Metafora jaringan atau komunitas menitikberatkan pada pola kontak dan hubungan formal dan informal agenda kebijakan dan pembuatan keputusan. Metafora ini terutama penting dalam kasus masyarakat yang sangat pluralistis, dan dimana ada multiplisitas pengaruh pada proses kebijakan. Analisis jaringan didasari oleh ide bahwa sebuah kebijakan dibentuk dalam konteks relasi dan dependensi. David Knoke dan James Kuklinski (dalam Parson, 2006:188) mengasumsikan analisis jaringan bahwa ; *pertama,* aktor berpartisipasi dalam sistem sosial dan dimana aktor lainnya mempengaruhi keputusan orang lain. *Kedua*, level struktur di dalam system social merupakan focus kajian.

Menurut Richardson et al (dalam Parson,2006:188-189), ada dua dimensi utama dari gaya kebijakan, yaitu: (1) gaya antisipatif (tendensi untuk mengantisipasi problems) atau gaya reaksioner (tendensi untuk bereaksi terhadap kemunculan kejadian dan situasi); (2) gaya pencarian konsensus (tendensi untuk membuat keputusan melalui kesepakatan antar kelompok yang berkepentingan) atau gaya yang cenderung memaksakan keputusan pada masyarakat. Gaya mana yang akan diterapkan, akan tergantung pada apakah pemerintah akan mengedepankan tendensi bernegoisasi dengan komunitas kebijakan, menggunakan pendekatan rasional, bergaya konsensus, atau bergaya atau bergaya konfrontasional tanpa terlalu banyak konsultasi dengan komunitas kebijakan. Menyadari bahwa kesetaraan dan keadilan gender sangat terkait dengan sistem nilai sosial budaya suatu masyarakat melalui proses pembiasaan terus menerus sehingga telah berakar kuat, maka gaya kebijakan yang dilakukan melalui negoisasi, consensus maupun konsultasi dengan komunitas kebijakan dipandang efektif dibandingkan dengan pendekatan yang konfrontasional.

**Analisis Inkrementalis (Pragmatis) dalam Perumusan Kebijakan**

Pendekatan ini lahir sebagai kritik dari pendekatan yang rasional. Dalam pendekatan ini, kebijakan publik merupakan varian ataupun kelanjutan dari kebijakan masa lalu. Pendekatan ini diambil ketika pengambil kebijakan berhadapan dengan keterbatasan waktu, informasi dan kecukupan dana untuk melakukan evaluasi secara komprehensif. Disisi lain, pengambil kebijakan dihadapkan pada ketidakpastian yang muncul disekelilingnya. Pilihannya adalah melanjutkan kebijakan di masa lalu dengan sedikit mengadakan perubahan. Charles E Lindblom sebagaimana dikutip oleh Parson (1997:284-287), sebagai penggagas model ini menyatakan pembuatan kebijakan tidak mau melakukan peninjauan secara ajek dari seluruh kebijakan yang dibuatnya. Inkrementalis di dalam usahanya menciptakan kebijakan/program dan pembiayaan-pembiayaan dasar pemikirannya bersifat konservatif. Dan perhatiannya pada program baru dipusatkan untuk menambah, mengurangi dan menyempurnakan program-program yang telah ada. Pembuat kebijakan pada umumnya menerima keabsahan (*legitimacy*) dari program-program yang telah ditetapkan dan menyetujui untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada sebelumnya.

Ada beberapa karakteristik dari model ini, yakni : ***pertama,*** pemilihan nilai/tujuan dan analisis empiris terhadap tindakan saling berkaitan; ***kedua****,* analisa cara/tujuan terbatas; ***ketiga,*** kebijakan dikatakan baik ditentukan atas dasar kesepakatan pelbagai pembuat keputusan; ***keempat*,** analisa dibatasi secara drastis; ***kelima*,** kegiatan membandingkan kebijakan yang lama dan baru mengurangi/menghilangkan peran teori.

Selain itu, model ini didukung oleh sifat-sifat manusia pada umumnya. Sebagian besar manusia cenderung mempertahankan stabilitas, kurang menyukai konflil dan tidak mau bersusah payah mencari hal-hal yang paling baik diantara yang terbaik. Karenanya perubahan dan penggantian kebijakan yag ada akan mengakibatkan tidak adanya stabilitas, terjadinya konflik dan merupakan upaya yang tidak programis. Kelemahan model ini terabaikannya peluang-peluang baru untuk memecahkan masalah, terlebih ditengah perubahan-perubahan yang banyak terjadi dalam pengaruh politik, kemampuan ekonomi, teknologi dan sebagainya.

**Analisis Kekuasaan untuk Perumusan Kebijakan**

Pendekatan kekuasaan (*power*) memandang perumusan kebijakan sebagai sesuatu yang dibentuk dan ditentukan oleh struktur kekuasaan, misalnya saja kelas, orang kaya, tatanan birokratis dan tatanan politik, kelompok penekan, kalangan profesional atau ahli pengetahuan tehnis. Pendekatan ini kemudian melahirkan variannya yakni : a). pendekatan elitisme; b). pendekatan pluralisme; c). pendekatan marxisme; d). pendekatan korporatisme; e). pendekatan profesionalisme; f). pendekatan teknokrasi .

*Pendekatan elitis* memfokuskan bagaimana cara kekuasaan dikonsentrasikan dalam perumusan kebijakan. Pendapatnya bahwa kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kelompok. *Pendekatan Pluralisme*memfokuskan cara kekuasan didistribusikan . Melalui pemikiran Dahl (1953) dan Charles Lindblom (1959) yang berpendapat bahwa perumusan kebijakan bukanlah kegiatan yang netral, tuntutan kepentingan bisnis mendominasi kepentingan kelompok yang lain, karenanya proses perumusan kebijakan harus dibiaskan untuk keuntungan pihak yang kuat, dan dimanfatkan untuk kelompok yang kurang kuat. *Pendekatan Marxisme****,*** memfokuskan pada konflik kelas dan kekuasaan ekonomi. Melalui karya Schmitter (1974) dan Lehmbruch (1982) yang menekankan pola korporatis dalam perumusan kebijakan dengan mengelola kelompok-kelompok dan elit-elit kunci dimasyarakat. *Pendekatan* *Profesionalisme****,*** memfokuskan pada kekuasaan kalangan profesional. Dalam perumusan kebijakan kalangan profesional, kalangan ini mempengaruhi proses perumusan kebijakan. *Pendekatan Teknokrasi*memfokuskan pada kekuasaan pakar tehnis. Pendekatan ini sebenarnya sduah dirintis lama, sejak jaman Taylor dan Gantt, sehingga dikatakan oleh Burnham (1941) bahwa revolusi manajerial telah melahirkan kelompok pakar (expert) yang berkuasa karena pengetahuan yang mereka miliki.

**Analisis Rasionalitas dalam Perumusan Kebijakan**

Pendekatan rasionalitas adalah model pembuatan kebijakan yang berfokus pada rasionalitas yang mengatakan bahwa, apabila kita ingin memahami keputusan yang riil, maka kita harus mempertimbangkan sejauhmana keputusan itu adalah hasil dari proses yang rasional. Konteksnya adalah ide rasionalitas ekonomi yang dikembangkan oleh teori ekonomi, dan ide rasionalitas birokratis yang dirumuskan oleh teori sosiologis tentang organisasi dan masyarakat industri.

Dikemukakan oleh Simon (1957:81-109) dalam Parson (2006) bahwasanya rasionalitas manusia adalah terbatas dikarenakan : a) Sifat pengetahuan yang tidak lengkap dan terfragmentasi, b) Konsekuensi yang tidak bisa diketahui, sehingga si pembuat kebijakan mengandalkan pada kapasitas untuk melaksanakan penilaian, c) Keterbatasan perhatian: problem harus ditangani dalam waktu serial, satu persatu karena pembuat keputusan tidak bisa memikirkan terlalu banyak isu pada saat yang sama; perhatian berpindah dari satu nilai ke nilai yang lain, d) Manusia belajar menyesuaikan prilaku mereka agar sejalan dengan tujuan yang diniatkan, kekuatan observasi dan komunikasi membatasi proses pembelajaran, e) Batas daya tampung (memori) pikiran manusia: pikiran hanya bisa memikirkan beberapa hal dalam waktu bersamaan, f) Manusia adalah mahluk dengan kebiasaan dan rutinitas, g) Rentang perhatian manusia terbatas, h) Lingkungan psikologis manusia terbatas, i)Prilaku dan perhatian awal akan cenderung bertahan dalam arah tertentu selama beberapa periode waktu, j) Pembuatan keputusan juga dibatasi oleh lingkungan organisasi yang menjadi kerangka bagi proses pemilihan.

**Analisis Kognitif dan Informasi dalam Perumusan Kebijakan**

Pembuatan kebijakan pada konteks ini mendapat pengaruh ilmu psikologi dan ilmu informasi. Pemikiran Herbert Simon (dalam Parson,2006: 337) yang dikembangkan ide awalnya tentang rasionalitas terkekang, merupakan pemikiran yang paling berpengaruh pada konteks ini. Pada pendekatan ini, Simon memfokuskan pada bagaimana orang (aktor dalam kebijakan) mendapatkan dan menggunakan informasi dan kemudian orang atau aktor itu memecahkan masalah.

Dalam konteks ini, Kaufman (Parson,2006:371-371) mengemukakan model integrative dalam pembuatan kebijakan. Model integrative Kaufman ini memfokuskan pada pemahaman pembuatan keputusan dalam konteks pemerintahan lokal. Kajiannya pada konteks mikro adalah bagaimana individu menentukan pilihan dan keputusan. Pada level makro, kelompok dan organisasi saling berinteraksi, memilih opsi dan membuat keputusan.

**Gambar 10.1**

**Model Pembuatan Keputusan Menurut Kaufman**

Prefensi

Opsi yang dibayangkan

Keputusan tentang tindakan atau strategi

Kejadian eksternal

Kemungkinan konsekuensi

Sumber ; Diadopsi dari Parson (2006:372)

**Gambar 10.2**

**Konteks organisasi dan lingkungan dalam pembuatan keputusan**

**Lingkungan**

**Organisasi**

**Kelompok Individual**

Sumber ; Diadopsi dari Parson (2006:372)

Pembuat keputusan membawa preferensi berupa pengetahuan, keahlian, dan kekuasaan yang berasal dari pandangannya, keahlian khususnya atau akses sumberdaya. Dia membentuk persepsi tentang isu-isu yang akan ditangani, opsi-opsi yang tersedia, konsekuensi pilihan, kemungkinan munculnya peristiwa tertentu, dan aturan keputusan yang berlaku. Pembuat keputusan mungkin mengidentifikasi beberapa hasil yang diharapkan, yang masih harus dinegoisasikan dengan lingkungan tempat implementasinya. Lingkungan keputusan terdiri dari individu, kelompok, organisasi, organisasi lain yang bisa mempengaruhi hasil dari keputusan berdasarkan keputusan mereka atau mempengaruhi dengan cara mengontrol sumberdaya atau kepentingan-kepentingan orang yang dapat dipengaruhi dengan oleh keputusan. Model ini sangat berguna untuk menjembatani teori kognisi dengan prilaku organisasional.

1. **Analisis Perumusan Masalah Kebijakan, Forecasting, Pengembangan Alternatif Kebijakan dan Rekomendasi Kebijakan**

Perumusan adalah hal pertama dan terpenting dalam analisis kebijakan. Analis kebijakan sering gagal karena memecahkan masalah yang salah dibanding gagal karena menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang benar. Karenanaya, inti dari analisis yang akan dilakukan adalah memastikan untuk menemukan pokok dari permasalahan. Berikut ini tindakan analisis dalam perumusan kebijakan.

**Analisis Identifikasi dan Perumusan Masalah Publik**

Sebuah masalah public dipahami sebagai belum terpenuhinya kebutuhan, nilai atau kesempatan yang diinginkan oleh public dan pemenuhannya hanya mungkin dilakukan melalui kebijakan pemerintah. Jones (1977) juga menegaskan bahwa tidak semua problem dapat menjadi problem umum, tidak semua problem umum bisa menjadi isu, dan tidak semua isu bisa masuk dalam agenda kebijakan. Karenanya, kunci keberhasilan dalam tahap ini adalah pembuat kebijakan harus mampu menemukan pokok dari permasalahan, kemudian merumuskan masalah secara benar. Perumus kebijakan harus punya kapasitas untuk itu, dan keberhasilan atau kegagalan dalam kegiatan ini akan berpengaruh pada proses perumusan kebijakan seterusnya.

Merumuskan masalah public yang benar dan tepat, tidaklah mudah karena sifat masalah public yang sangat kompleks. Dunn (2000: 214) menguraikan karakteristik dari masalah public, yaitu :

1. Saling ketergantungan (*interdependence)* antara berbagai masalah. Suatu masalah public bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi saling terkait antara satu masalah dengan masalah yang lain. Ini mengharuskan, analis kebijakan menggunakan pendekatan holistic dalam memecahkan masalah dan akar masalahnya.
2. Subyektivitas dari masalah kebijakan. Masalah kebijakan adalah hasil pemikiran dalam konteks lingkungan tertentu. Karenanya suatu fenomena yang dianggap masalah dalam lingkungan tertentu, bisa jadi bukan masalah untuk lingkungan yang lain.
3. Artificiality masalah, yakni suatu fenomena dianggap sebagai masalah karena ada keinginan manusia untuk mengubah situasi.
4. Dinamika masalah kebijakan. Solusi terhadap masalah selalu berubah. Masalah yang sama belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan yang sama dengan konteks lingkungan yang berbeda. Demikian juga, masalah yang sama belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan yang sama kalau waktunya berbeda.

Perumusan masalah diawali dari adanya situasi masalah, yakni serangkaian situasi yang menimbulkan rasa ketidakpuasan dan terasa ada sesuatu yang salah. Kemudian para analis terlibat dalam pencarian masalah, yang selanjutnya lahir apa yang disebut meta masalah, yakni masalah yang belum tertata dengan rapi. Dari meta masalah, analisis dilanjutkan dengan melakukan pendifinisian masalah dalam istilah yang paling umum dan mendasar, misalnya menentukan apakah masalahnya termasuk dalam masalah social, politik, ekonomi, selanjutnya akan lahir masalah substantive. Melalui proses spesifikasi masalah, masalah substantive berubah menjadi masalah formal, yakni masalah yang telah dirumuskan secara spesifik dan jelas.

Ada beberapa metode dalam merumuskan masalah (Subarsono, 2005:32-35), yaitu : (1) analisis batas, yakni upaya pemetaan masalah melalui snowball sampling dari stakeholders, dimana analis kebijakan sering dihadapkan pada masalah tidak jelas dan rumit; (2) analisis klasifikasi, yakni mengklasifikasikan masalah dalam kategori tertentu untuk tujuan memudahkan analisis; (3) analisis hirarki, metode untuk menyusun masalah berdasarkan sebab-sebab yang mungkin dari situasi masalah; (4) brainstorming, yakni metode untuk merumuskan masalah melalui curah pendapat dari orang-orang yang mengetahui kondisi yang ada; (5) analisis perspektif ganda, merupakan metode untuk memperoleh pandangan yang bervariasi dari perspektif yang berbeda mengenai suatu masalah dan pemecahannya.

**Forecasting**

Forecasting adalah analisis kegiatan yang menentukan informasi factual tentang situasi masa depan atas dasar informasi yang sekarang. Ada beberapa tujuan forecasting (Subarsono, 2005:37), yaitu : (1) memberikan informasi mengenai kebijakan di masa depan dan konsekuensinya; (2) melakukan control dan intervensi kebijakan guna mempengaruhi perubahan, sehingga akan mengurangi resiko yang besar. Ada 3 jenis forecasting atau peramalan, yaitu : (1). Proyeksi, yakni ramalan yang didasarkan pada ekstrapolasi berdasarkan kecenderungan masa lalu, dengan asumsi masa dating memiliki pola yang sama dengan masa lalu; (2). Prediksi, ramalan yang didasarkan pada asumsi teoritik; (3). Perkiraan, yakni ramalan yang didasarkan pada penilaian para pakar tentang situasi masalah yang akan dating.

Adapun obyek peramalan dalam kebijakan public adalah : (1). Konsekuensi kebijakan sekarang, yaitu ramalan yang digunakan untuk mengestimasi kondisi yang akan dating, bila tidak ada kebijakan baru; (2). Konsekuensi kebijakan baru, yakni peramalan yang digunakan untuk mengestimasi kondisi akan dating, bila diterapkan kebijakan baru; (3) Isi kebijakan baru, yakni ramalan untuk mengestimasi perubahan dalam isi kebijakan baru; (4). Prilaku stakeholders, yakni ramalan yang digunakan untuk mengestimasi dukungan/penolakan yang lahir dari kebijakan baru.

**Pengembangan Alternatif Kebijakan**

Mengembangkan alternative kebijakan bukanlah pekerjaan yang mudah. Patton dan Sawicki (1987) dalam Subarsono (2005:54-57) mengidentifikasi beberapa metode pembuatan kebijakan untuk mengembangkan alternative kebijakan, yaitu : (1). Metode Status Quo (*No-Action*). Suatu alternative dipilih apabila pemegang otoritas, kelompok masyarakat atau instansi merasa bahwa masalah yang ada dapat diperbaiki dengan alternative yang bersangkutan. (2). Metode Survei cepat (*Quick Surveys*). Analisis kebijakan dengan menanyakan kepada teman/kelompok tertentu mengenai suatu masalah dan meminta saran bagaimana memecahkan masalah. Metode ini menghasilkan serangkaian daftar saran alternative kebijakan untuk diolah. (3). Tinjauan Pustaka (*Literature Review*). Berbagai sumber literature (buku, jurnal) dapat digunakan untuk sumber informasi guna manawarkan alternative pemecahan masalah . (4). Perbandingan dengan pengalaman nyata (*Comparison of real worls experiences)*. Memperoleh informasi tentang alternative kebijakan yang nyata digunakan oleh pihak lain, terutama apabila masalah yang dihadapi memiliki kesamaan setting social. (5). Metode *Analogy*, *Methapor* and *Synetics*. (6). Curah Pendapat (*Brainstorming*), Dapat dilakukan melalui konferensi yang kreatif guna menghasilkan serangkaian daftar (checklist) ide//gagasan untuk memecahkan masalah.

Dalam memilih alternative kebijakan public, ada beberapa variable yang perlu dipertimbangkan, yakni : (1). Kesesuaian dengan visi dan misi organisasi; (2). Applicable (dapat diimplementasikan); (3).Mampu mempromosikan pemerataan dan keadilan pada masyarakat; (4). Mendasarkan pada criteria penilaian yang jelas dan transparan. Dalam hubungannya dengan criteria yang berfungsi sebagai standar penilaian, Bardach sebagaimana dikutif oleh Subarsono (2005: 58-60) mengajukan criteria seleksi alternative yakni : (1). Kelayakan tehnis (*tehnical feasibility*), (2). Kemungkinan ekonomik dan financial (*economic and financial possibility*). (3). Kelayakan politik (*political viability*). (4). Kelayakan administrative (*administrative operability*).

**Rekomendasi kebijakan**

Tujuan rekomendasi kebijakan adalah memberikan alternative kebijakan yang paling unggul dibanding dengan alternative kebijakan yang lain. Proses pemilihan alternative kebijakan membutuhkan perhatian yang cermat agar policy makers tidak terjebak pada pilihan yang hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, atau bias politik. Aspek rasionalitas dan aseptabilitas dari sebuah alternative merupakan pertimbangan utama dalam memilih alternative, yang bukan berarti aspek lain diabaikan.

Rekomendasi kebijakan adalah proses untuk melakukan pilihan terhadap berbagai alternative kebijakan berdasarkan criteria-kriteria yang telah ditetapkan. Ada beberapa metode yang digunakan untuk proses seleksi kebijakan (Subarsono, 2006:66-84), yaitu; (1). *Metode Perbandingan*. (2). *Metode memuaskan* (*Satisficing Method*). (3). *Lexicographic Ordering Method*. (4). *Non Dominated Alternatives Method*. (5). *Metode May*. (6). *Metode Pro dan Kontra*. (7). *Analisis Biaya dan Manfaat* (*Cost and Benefit Analysis*). (8). *Pohon Keputusan*. (9). *Total Profit*. (10). *Ranking by Inspection*. (11). *Payback Period*.

1. **RANGKUMAN**

Analis kebijakan sering gagal karena memecahkan masalah yang salah dibanding gagal karena menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang benar. Karenanaya, inti dari analisis yang akan dilakukan adalah memastikan untuk menemukan pokok dari permasalahan. Berikut ini tindakan analisis dalam perumusan kebijakan.

Analisis dalam formulasi kebijakan menggunakan pendekatan diantaranya : 1) analisis jaringan, 2) analisis inkrementalis, 3) analisis rasionalitas, 4) analisis kekuasaan, 5) analisis kognitif.

Proses analisis perumusan kebijakan dimulai dari : 1) identifikasi dan perumusan masalah, 2) Forecasting, 3) Pengembangan alternative kebijakan, 4) Rekomendasi kebijakan.

1. **LATIHAN**
2. Gunakan Pendekatan jaringan untuk merumuskan kebijakan dan program-program pembangunan.
3. Jika menggunakan analisis kognitif,apa yang menjadi penyebab kegagalan hasil kebijakan.
4. Deskripsikan analisis incremental untuk beberapa kasus kebijakan/program di Indonesia.
5. Lakukan forecasting untuk masa depan kebijakan desa di Indonesia
6. Apa rekomendasi kebijakan menurut sdr, jika masalah pokok adalah tingginya pengangguran dikarenakan daya serap pekerjaan yang rendah.
7. **PUSTAKA RUJUKAN**

Parson,Wayne.2006. Public Policy : ***Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan***. Kencana. Jakarta

Riege,Andreas dan Linsey,Nicholas.2006. ***Knowledge Management in The Public Sector: Stakeholders Partnership in The Public Policy Development*** . Artikel dalam Journal of Knowledge Management Vol.10 No.3 Tahun 2006. Emerald Group Publishing Limited.ISSN 1357-3270.

William,Dunn. 2000. ***Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua***. Gajahmada University Press. Yogyakarta

1. **GLOSSARI**

***Stakeholders*** : Kelompok yang berkepentingan terhadap sebuah kebijakan, yang biasanya adalah kelompok yang terkena dampak langsung kebijakan maupun yang memiliki kepedulian terhadap kebijakan

***Kemitraan*** : Hubungan antara pemerintah-swasta atau pemerintah-NGO yang saling menguntungkan.